

Nama : Anggi Kurnia Cahyani

NPM : 2213031043

(Jawaban Studi Kasus)

1. Analisis penyebab kegagalan relatif Making Indonesia 4.0 dalam mendorong pertumbuhan lima sektor prioritas dapat dijelaskan melalui teori kebijakan industri seperti capability building, state-industry coordination, dan embedded autonomy. Pertama, kebijakan ini terlalu berfokus pada teknologi maju—otomasi, IoT, dan digitalisasi—tanpa terlebih dahulu memastikan kesiapan productive capabilities di tingkat perusahaan, terutama UMKM yang mendominasi struktur manufaktur Indonesia. Tanpa fondasi teknologi dasar, upskilling tenaga kerja, dan kesiapan infrastruktur, intervensi high-tech cenderung tidak efektif. Kedua, koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri lemah, tercermin dari tidak sinkronnya regulasi lintas kementerian (keuangan, perindustrian, ketenagakerjaan, pendidikan vokasi) sehingga sektor prioritas tidak memperoleh dukungan terintegrasi. Ketiga, Making Indonesia 4.0 tidak diiringi reformasi struktural seperti penyederhanaan logistik, perbaikan biaya energi industri, serta kepastian hukum investasi—faktor yang menurut teori new structural economics merupakan prasyarat pertumbuhan manufaktur. Keempat, insentif fiskal dan pembiayaan inovasi masih minim dan tidak tepat sasaran, sehingga tidak mendorong perusahaan mengadopsi teknologi baru. Akibatnya, kebijakan lebih banyak menjadi dokumen strategis daripada program transformasi nyata di lapangan.

2. Perbandingan dengan Vietnam dan Korea Selatan

Perbedaan efektivitas kebijakan industri Indonesia dengan Vietnam dan Korea Selatan dapat dilihat dari pendekatannya. Vietnam menerapkan strategi export-oriented industrialization berbasis FDI intensif, dengan fokus kuat pada kemudahan investasi, kawasan industri yang kompetitif, dan biaya produksi rendah. Pemerintah Vietnam menyediakan koordinasi yang stabil dan cepat dalam perizinan, serta menciptakan policy credibility yang menarik perusahaan global seperti Samsung, Foxconn, dan Intel, sehingga terjadi technology spillover ke industri lokal. Sementara Korea Selatan mengadopsi developmental state model, di mana pemerintah memiliki embedded autonomy dan bekerja erat dengan konglomerat (chaebol) untuk memetakan target teknologi jangka panjang, mengelola insentif, dan menghubungkan inovasi dengan kebutuhan industri. Negara ini konsisten melakukan investasi besar dalam R&D dan pendidikan teknik sehingga pertumbuhan industrinya bersifat capability-driven, bukan sekadar berbasis biaya murah. Sebaliknya, Indonesia cenderung menerapkan kebijakan industri yang

terlalu luas, tidak fokus, dan sering berubah, tanpa mekanisme kedisiplinan (performance discipline) terhadap pelaku industri maupun konsistensi kebijakan jangka panjang.

### 3. Rancangan Kebijakan Industri Alternatif yang dapat diterapkan untuk Indonesia

Kebijakan industri alternatif bagi Indonesia perlu lebih kontekstual dan berbasis penguatan kapabilitas, bukan sekadar adopsi teknologi tinggi. Pertama, pemerintah perlu membangun National Industrial Capability Program yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis, insinyur, dan operator manufaktur melalui reformasi vokasi terintegrasi dengan industri. Kedua, Indonesia membutuhkan cluster-based industrial strategy, yaitu pengembangan kawasan industri tematik (misalnya elektronik di Batam, tekstil di Jawa Barat, makanan-minuman di Jawa Timur) dengan fasilitas logistik, energi, dan riset terhubung langsung dengan universitas atau lembaga litbang. Ketiga, insentif fiskal harus diarahkan untuk technology upgrading yang realistik, seperti mesin efisiensi energi, otomasi dasar, dan digitalisasi proses sederhana, bukan hanya menargetkan teknologi canggih. Keempat, pemerintah perlu memperbaiki koordinasi kebijakan melalui Industrial Policy Delivery Unit yang berfungsi memastikan regulasi antar-kementerian sinkron dan target kinerja industri terpantau. Kelima, Indonesia harus memperkuat integrasi global melalui reformasi logistik, perjanjian dagang selektif, dan kerja sama strategis dengan perusahaan multinasional untuk mendorong knowledge transfer. Kebijakan ini rasional karena menyesuaikan struktur industri Indonesia yang didominasi UMKM, kondisi infrastruktur yang belum merata, serta kebutuhan membangun kapabilitas secara bertahap untuk keluar dari jebakan deindustrialisasi dini.